

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Implementasi

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu keputusan. Tindakan-tindakan tersebut berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. (Anisa Melani dan Erizal Gani, 2023:11)

Implementasi kurikulum merdeka membutuhkan kerjasama dan komitmen dari semua pihak terutama guru dan sekolah agar siswa dapat mendapatkan pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan potensi mereka. Dengan begitu, diharapkan generasi muda Indonesia dapat menjadi manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di berbagai bidang kehidupan. (Indri Lastriyani dan Lidiawati dkk, 2023:6)

Tahapan implementasi kurikulum bukanlah suatu peraturan atau standar yang ditetapkan Pemerintah. Tahapan ini dirancang untuk membantu pendidik dan satuan pendidikan dalam menetapkan target implementasi Kurikulum Merdeka. Kesiapan pendidik dan satuan pendidikan tentu berbeda-beda, oleh karena itu tahapan implementasi ini dirancang agar setiap pendidik dapat dengan percaya diri mencoba mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Kepercayaan diri yang dimaksud merupakan keyakinan bahwa pendidik dapat terus belajar dan mengembangkan kemampuan dirinya untuk melakukan yang terbaik

dalam mengimplementasikan kurikulum, dan yang lebih penting lagi, dalam mendidik. Kemampuan untuk terus belajar merupakan modal penting bagi pendidik. (BSKAP,2022:1)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum merdeka adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci serta penerapan kurikulum merdeka ini bersifat fleksibel. Kurikulum yang dibuat dapat dikembangkan hingga didapat pembelajaran yang lebih efektif, dengan catatan tetap mengikuti kaidah dan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan yang dilakukan memiliki tujuan yang mulia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberhasilan sector pendidikan memiliki banyak faktor pendukung yang ada didalamnya. Proses aktivitas yang dilakukan secara terencana berdasarkan suatu pedoman dan dilakukan atas dasar untuk mencapai tujuan dalam suatu kegiatan pembelajaran.

Bagi satuan pendidikan yang memilih menggunakan Kurikulum Merdeka, ada 3 (tiga) pilihan kategori implementasi Kurikulum Merdeka, yaitu:

- 1) **Kategori Mandiri Belajar:** Satuan pendidikan menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, dengan tetap menggunakan Kurikulum 2013 atau Kurikulum 2013 yang disederhanakan/ Kurikulum Darurat.
- 2) **Kategori Mandiri Berubah:** Satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022/2023 akan menerapkan Kurikulum Merdeka, menggunakan perangkat ajar yang disediakan dalam PMM sesuai dengan jenjang satuan pendidikan yaitu perangkat ajar untuk jenjang PAUD, kelas I, kelas IV, kelas VII, atau kelas X.

- 3) Kategori Mandiri Berbagi: Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Merdeka dengan melakukan pengembangan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD, kelas I, kelas IV, kelas VII, atau kelas X mulai tahun ajaran 2022/2023

Sedangkan, dalam pelaksanaan pembelajaran Kurikulum Merdeka merupakan rangkaian siklus yang melalui empat tahapan, yaitu:

- a) Asesmen diagnostik dimana Pembelajaran dapat diawali dengan proses perencanaan asesmen dan perencanaan pembelajaran. Pendidik perlu merancang asesmen yang dilaksanakan pada awal pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan pada akhir pembelajaran. Perencanaan asesmen, terutama pada asesmen awal pembelajaran sangat perlu dilakukan karena untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik.
- b) Perencanaan dimana Rencana pembelajaran dirancang untuk memandu guru melaksanakan pembelajaran sehari-hari untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, rencana pembelajaran yang dibuat masing-masing pendidik pun dapat berbeda-beda, terlebih lagi karena rencana pembelajaran ini dirancang dengan memperhatikan berbagai faktor lainnya, termasuk faktor peserta didik yang berbeda, lingkungan sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, dan lainlain.
- c) Pembelajaran Selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala, untuk mengetahui

progres pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran, jika diperlukan. Pada akhir proses pembelajaran, guru juga bisa melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran.

- d) Evaluasi, dalam proses evaluasi pembelajaran, pendidik berperan sebagai evaluator berfungsi untuk mengetahui berhasil atau tidaknya seorang pendidik dalam proses pembelajaran, atau evaluasi juga dapat dikatakan sebagai penentu untuk mengetahui apakah proses/cara belajar mengajar itu harus dipertahankan atau diperbaiki lagi.

b. Unsur-unsur Implementasi

Unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu: (Tadjan 2006:28)

- 1) Unsur Pelaksanaa

Pelaksanaan kebijakan merupakan pihakpihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian

- 2) Adanya Program Yang Dilaksanaka

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan

3) Target Group Atau Kelompok Sasaran

Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan

c. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi

Terdapat empat faktor mempengaruhi implementasi yaitu:
(Sujianto, 2008:38)

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Tanpa sumber daya yang memadai pula suatu implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah jumlah orang atau staff sebagai pelaksana yang mempunyai keahlian yang memadai, informasi, dan fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana diartikan sebagai kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi psikologi para pelaksana

dalam melaksanakan kegiatan. Adapun yang menjadi unsur dalam motivasi tersebut adalah adanya pemahaman dan pengetahuan, adanya arah respon dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan, dan intensitas dari respon itu sendiri.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksana program. Ada dua unsur dalam hal ini, yaitu prosedur rutin atau standar prosedur operasi dan fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan).

d. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi

Terdapat enam faktor yang mempengaruhi implementasi:

- 1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.
- 2) Sumber-sumber.
- 3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana.
- 4) Karakteristik-karakteristik badan-bada pelaksana.
- 5) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
- 6) Kecenderungan para pelaksana. (Budiwimarno,2007:157)

2. Kurikulum Merdeka

a. Pengertian Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka adalah suatu pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan dan kemandirian kepada siswa dalam proses pembelajaran. Konsep ini mendorong siswa untuk aktif dan terlibat langsung dalam menggali pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan membentuk sikap yang positif. (Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun dkk, 2020:27)

Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran (learning

crisis) yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana.

Temuan itu juga juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antarwilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi Covid-19. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistemik, salah satunya melalui kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas.

Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itulah Kemendikbudristek mengembangkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. (Kemendikbud RI, 2023)

Kebijakan merdeka belajar dilaksanakan untuk percepatan pencapaian tujuan nasional pendidikan, yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai keunggulan dan daya saing dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing diwujudkan kepada peserta didik yang berkaraktermulia dan memiliki penalaran tingkat tinggi, khususnya dalam literasi dan numerasi. (Tajeri Khoirurrijal dan Fadrianti Sofia dkk,2022:7)

Kurikulum Merdeka dapat terus diterapkan secara berkelanjutan melalui tiga hal, yaitu:

- 1) Regulasi yang fundamental, misalnya. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Regulasi dapat menjadi acuan bagi pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah juga banyak hal lainnya.
- 2) Sisi asesmen. Kurikulum harus didampingi sistem penilaian atau asesmen yang baik sebagaimana Asesmen Nasional. Asesmen Nasional sangat berbeda dengan Ujian Nasional. Asesmen Nasional dirancang bukan untuk menguji pengetahuan, tetapi untuk menilai kemampuan bernalar para peserta didik. Asesmen Nasional juga menjadi penilaian yang menggambarkan gagasan sekolah yang ideal. Asesmen Nasional sendiri bukan hanya untuk menilai peserta didik dan sekolah melainkan menilai pula kinerja pemerintah daerah. Melalui hasil penilaian kinerja daerah tersebut, nantinya pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing satuan pendidikan dan daerah.
- 3) Dukungan publik. Dukungan publik menjadi hal krusial lainnya dalam keberlanjutan penerapan kurikulum. Dukungan publik yang kuat akan sulit menggoyahkan pergantian kebijakan. (Kemendikbudristek, 2023)

Tabel 2.1 Tahapan-Tahapan Perubahan Kurikulum Di Indonesia.

Tahun	Kurikulum	Keterangan
1947	Rentjana Pelajaran 1947	<p>Kurikulum ini dibuat tepat setelah dua tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penamaan kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Leerplan. Karena pada masa itu, Indonesia berada dalam pergolakan akibat agresi militer Belanda beserta sekutunya.</p> <p>Saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah mencoba rancangan sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Sehingga belum berfokus pada pendidikan pikiran, melainkan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat</p>
1952	Rentjana Pelajaran Terurai 1952	<p>Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap Kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan.</p> <p>Dalam kurikulum ini, berlaku pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja</p>
1964	Rentjana Pendidikan 1964	<p>Konsep pembelajaran dalam Kurikulum 1964 berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana.</p> <p>Penerapan Kurikulum 1964 di dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum</p>

		<p>1964 bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik dari jenjang Sekolah Dasar (SD).</p> <p>Selain itu pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari bagi siswa untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai minat dengan bakatnya.</p>
1968	Kurikulum 1968	<p>Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama.</p> <p>Pada Kurikulum 1968 ini pula, sistem penjurusan dimulai pada kelas 2 SMU atau kelas 11</p>
1975	Kurikulum 1975	<p>Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>Kurikulum 1975 juga lebih merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional. Sehingga memunculkan istilah satuan pelajaran (rencana pelajaran setiap satuan bahasan).</p> <p>Namun penerapan kurikulum ini ramai dikritik, karena guru menjadi lebih sibuk untuk menuliskan rincian tiap kegiatan pembelajaran.</p> <p>Beberapa mata pelajaran akhirnya mengalami perubahan nama seperti mata pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi Matematika.</p>

1984	Kurikulum 1984	<p>Di tahun 1984 terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia, karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespons kemajuan di kalangan masyarakat.</p> <p>Dalam kurikulum 1984, ditambahkan juga mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).</p>
1994 dan 1999	Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999	<p>Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984.</p> <p>Pada praktiknya, kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan dari praktisi pendidikan hingga orangtua pelajar. Karena materi pembelajaran dianggap lebih berat dan padat. Kurikulum ini juga menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain.</p> <p>Dalam Kurikulum ini pula terjadi perubahan sistem pembagian evaluasi pembelajaran dari semester ke caturwulan. Selain itu terjadi perubahan singkatan dan nama SMP (Sekolah Menengah Pertama) menjadi SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), serta SMA (Sekolah Menengah Atas) menjadi SMU (Sekolah Menengah Umum).</p> <p>Mata pelajaran PSPB dihapuskan pada penerapan kurikulum ini dan penjurusan SMA dibagi menjadi tiga program, yakni IPA, IPS, dan Bahasa.</p>
2004	Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004	<p>Pada tahun 2004 diluncurkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sebagai pengganti Kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi</p>

		<p>yang harus mengandung tiga unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi, dan pengembangan pembelajaran.</p> <p>KBK mempunyai ciri-ciri ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.</p>
2006	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006	<p>Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2003.</p> <p>Kurikulum ini hampir mirip dengan Kurikulum 2004. Perbedaan menonjol pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu dari desentralisasi pendidikan Indonesia. Pada Kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran di himpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).</p>
2013	Kurikulum 2013 (K-13)	<p>Kurikulum 2013 merupakan kurikulum diterapkan pemerintah menggantikan KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 adalah</p>

		<p>membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21.</p> <p>Ada 4 aspek penilaian dalam K-13 ini aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku.</p>
2022	Kurikulum Merdeka Belajar	<p>Kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran (learning crisis) yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi Covid-19 yang mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh.</p> <p>Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin. Sehingga peserta didik memiliki waktu memahami konsep dan menguatkan kompetensi.</p>

b. Karakteristik Kurikulum Merdeka

Karakteristik utama kurikulum merdeka yang mendukung pembelajaran adalah:

- 1) Pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skills dan karakter profil pelajar pancasila.
- 2) Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.
- 3) Fleksibel bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. (I

Komang Wahyu Wiguna dan Mada Adi Nugraha
Tristaningrat,2022:17)

- 4) Memfokuskan pembelajaran secara mendalam pada materi esensial saja,
- 5) Efisiensi waktu yang lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata.
- 6) Capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran yang fleksibel mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan.
- 7) Memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan melaksanakan pembelajaran berkualitas, mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. (Moh Ali dan Akhyak,2023:72)

c. Prinsip Kurikulum Merdeka

Kajian Akademik kurikulum merdeka menetapkan prinsip perancangan kurikulum merdeka berdasarkan kebijakan merdeka belajar. Dimana paradigma yang dibangun adalah menguatkan kemerdekaan guru sebagai pemegang kendali dalam proses pembelajaran dan menguatkan hak dan kemampuan peserta didik untuk menentukan proses pembelajaran melalui penetapan tujuan belajarnya.

Adapun keenam prinsip perancangan kurikulum merdeka sebagai berikut:

- 1) Sederhana

Prinsip pertama adalah Sederhana. Maksudnya, rancangan kurikulum merdeka perlu mudah dipahami dan diimplementasikan. Rancangan kurikulum ataupun inovasi pendidikan lainnya menjadi lebih sederhana bagi pendidik apabila perubahannya tidak terlalu jauh daripada yang sebelumnya. Jika memerlukan perubahan cukup besar, dapat disederhanakan dengan cara memberikan dukungan implementasi yang bertahap agar tingkat kesulitannya tidak terlalu besar untuk pendidik.

2) Fokus pada Kompetensi dan Karakter semua Peserta Didik

Prinsip yang kedua adalah fokus pada kompetensi dan karakter peserta didik. Istilah “fokus” memiliki makna memusatkan perhatian pada materi pelajaran atau konten yang lebih sedikit jumlahnya agar pembelajaran dapat lebih mendalam dan lebih berkualitas. Kompetensi dan karakter merupakan target dari kurikulum sebelumnya, baik kurikulum 2006 maupun kurikulum 2013. Hal ini sesuai dengan prinsip yang pertama yaitu sederhana.

3) Fleksibel

Prinsip ketiga yaitu Fleksibilitas yaitu berkaitan dengan otonomi dan kemerdekaan guru dan peserta didik dalam mengendalikan proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Kurikulum Merdeka) yang telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022.

4) Selaras

Prinsip keempat yaitu selaras. Menurut OECD, keselarasan (*alignment*) berkaitan dengan tiga hal keselarasan antara kurikulum, proses belajar (*pedagogi*), dan asesmen; keselarasan antara kurikulum dan sistem tata kelola dan kompetensi guru; serta keselarasan dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembelajaran individu sejak usia dini hingga perguruan tinggi.

5) Bergotong Royong

Prinsip kelima dalam rancangan kurikulum merdeka adalah bergotong royong. Dimana proses perancangan kurikulum merdeka melibatkan berbagai instansi pemerintahan yang menangani pendidikan dan para akademisi LPTK dan universitas. Prinsip ini diperlukan dalam rangka mendapatkan dukungan dan persetujuan dari berbagai pihak. karena menurut Ornstein dan Hunkins (2018:10) Perancangan kurikulum adalah proses yang kompleks, bukan semata-mata proses ilmiah melainkan juga politik

6) Pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya.

7) Pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila, berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum.

- 8) Pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik. Satuan pendidikan menerjemahkan Capaian Pembelajaran dengan menyusun kurikulum operasional dan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar pelajar dan karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Muatan capaian pembelajaran dapat dikelola pendidik sebagai mata pelajaran tersendiri, tematik, integrasi, atau sistem blok.
- 9) Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam satu tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler/mingguan.
- 10) Memperhatikan Hasil Kajian dan Umpan Balik

Prinsip terakhir dari perancangan kurikulum merdeka adalah memperhatikan hasil kajian dan umpan balik. Maksudnya kurikulum merdeka perlu dirancang berbasis pada data yang sah sehingga dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. (Yeti Dewi Purwanti,2022:2)

d. Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum Merdeka

Tentunya setiap implementasi kebijakan selalu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan penerapan kurikulum merdeka diberbagai jenjang satuan pendidikan Kelebihan yang paling mencolok dari penerapan kurikulum ini adalah siswa perlu melakukan proyek-proyek tertentu agar mereka lebih aktif dalam upaya mereka untuk mengeksplorasi diri. Selain itu, kurikulum ini juga lebih interaktif dan tepat waktu.

Meski pun demikian, penerapan Kurikulum Merdeka tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Misalnya, persiapan penggunaan

kurikulum ini dinilai masih dianggap belum matang. Hal ini tercermin dari minimnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengimplementasikan kurikulum ini. (Ahmad Zainuri, 2023:20)

Adapun keunggulan kurikulum merdeka sebagai berikut:

1) Lebih sederhana dan mendalam

Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan.

2) Lebih merdeka

Merdeka bagi Peserta didik berarti yaitu Tidak ada program khusus di SMA, dan siswa memilih mata pelajaran berdasarkan minat, bakat, dan cita-citanya. Merdeka bagi Guru yaitu Guru mengajar sesuai dengan tingkat dan perkembangan siswa. Dan bagi Sekolah yang dimaksud yaitu sekolah yang berwenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan siswa.

3) Lebih relevan dan interaktif

Pembelajaran melalui kegiatan proyek (project based learning) adalah berbagai dukungan untuk pengembangan kepribadian dan keterampilan dengan cara aktif menangani isu-isu terkini seperti lingkungan, kesehatan, dan isu-isu lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswanya.

e. Tujuan Kurikulum Merdeka

Adapun tujuan dari kurikulum merdeka sebagai berikut:

1) Menciptakan pendidikan yang menyenangkan

Tujuan kurikulum merdeka belajar yang pertama adalah menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Kurikulum ini tekanan pendidikan Indonesia pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai nilai-nilai bangsa Indonesia. (M.Iqbal dan Others, 2022: 10.2)

2) Mengejar ketertinggalan pembelajaran

Salah satu tujuan kurikulum merdeka belajar adalah mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan wabah covid-19. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, yaitu siswa diberi kebebasan dalam memilih diminatinya dalam pembelajaran.

3) Dilengkapi potensi peserta didik

Tujuan kurikulum merdeka belajar selanjutnya, yaitu mengembangkan potensi peserta didik sehingga pembelajaran akan lebih mendalam. Selain itu, kurikulum merdeka belajar juga berfokus pada materi esensial dan kebutuhan peserta didik pada fasenya.

Dengan adanya kurikulum merdeka belajar diharapkan mampu mengembangkan kompetensi para peserta didik. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri, dimana kurikulum merdeka belajar ini juga memudahkan guru dalam memberikan Pembelajaran kepada peserta didik.

f. Manfaat Kurikulum Merdeka

Kebijakan Merdeka merupakan suatu kebijakan yang meringankan tugas guru serta memberi kesempatan pada siswa untuk menunjukkan keberagaman potensi dengan caranya sendiri. Sehingga manfaat kebijakan Merdeka Belajar yaitu:

1) Mengurangi Beban Guru

Guru tidak lagi merasa terbebani dengan tugas administrasinya yang cenderung bersifat intimidatif. Dengan kondisi tersebut, guru akan merasa lebih leluasa dalam mengajar siswanya dengan merdeka dan bahagia.

2) RPP yang lebih sederhana

Dengan adanya kebijakan ini, guru bebas membuat, menggunakan maupun mengembangkan RPP dengan catatan tidak menghilangkan tiga komponen utama pada RPP yakni tujuan, kegiatan pembelajaran dan asesmen.

3) Menciptakan Belajar Lebih Menyenangkan

Melalui kebijakan Merdeka belajar, dimaksudkan suasana pembelajaran lebih menggembirakan, pastinya akan mempengaruhi kualitas pembelajaran.

4) Kebebasan Dalam Berekspresi

Dengan hal ini, diharapkan akan dapat menciptakan lingkungan yang terbebas dari beragam permasalahan serta tekanan psikologis. Terlebih lagi pada guru dengan kemerdekaan mengajar yang dimiliki oleh siswa maka guru bisa terfokus dalam mengoptimalkan kecerdasan anak.

5) Tidak Menuntut Siswa Menjadi Sama

Ketika siswa sudah memahami bakat dan minat yang dimilikinya, maka mereka akan senantiasa mengembangkan dirinya dan berlatih untuk selalu mengasah kemampuannya. Selama proses tersebut, guru harus menjadi mediator, pendengar, serta penasehat yang baik dalam mengarahkannya.

6) Mendukung Inovasi Guru Dalam Mengajar

Dengan adanya merdeka belajar, guru diberi kebebasan untuk berinovasi dalam mengenalkan metode pembelajaran sendiri yang baik supaya menjadikan kelas hidup menyenangkan. (Ibid,2007:15).

g. Perbedaan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru mempunyai keleluasaan dalam memilih perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan minat peserta didik dan kebutuhan belajar. (Khooirujjal dkk,2010:7)

Sedangkan Kurikulum 2013 disebut dengan kurikulum berbasis karakter. Dengan tujuan karakter dalam Kurikulum 2013 untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang dimana mengarah kepada pembentukan akhlak mulia dan budi pekerti peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan disetiap satuan pendidikan. (E Mulyasa:2007:7)

Terdapat perbedaan-perbedaan antara Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013, diantaranya:

1) Kerangka Dasar

Landasan utama dari Kurikulum 2013 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sementara itu, Kurikulum Merdeka lebih menekankan kepada pengembangan profil pelajar Pancasila khususnya pada peserta didik.

2) Kompetensi yang dituju

Kompetensi di Kurikulum 2013 disusun dalam bentuk kompetensi dasar (KD) dan juga kompetensi inti sebagai penilaian, meliputi aspek sikap sosial, sikap spiritual, pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan kompetensi di merdeka belajar dan capaian pembelajaran disusun per fase dalam bentuk paragraf yang memuat sikap, pengetahuan, keterampilan dalam menguatkan serta meningkatkan kompetensi

3) Struktur kurikulum

Pada Kurikulum 2013 jam pembelajaran akan diatur selama seminggu, aturan alokasi waktu pembelajaran dibahas secara rutin dalam setiap minggunya pada setiap semester. Sementara Kurikulum Merdeka dalam struktur pembelajarannya terbagi menjadi 2 yaitu: pertama, pembelajaran reguler dan pembelajaran rutin (kegiatan intrakurikuler). Yang kedua, mengenai proyek P5 sebagai pengembangan jiwa berkarakter Pancasila pada peserta didik.

4) Pembelajaran

Pada Kurikulum13 pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan berlaku untuk semua mata pelajaran Sementara pada pembelajaran Kurikulum Merdeka belajar lebih

menguatkan kepada pembelajaran yang berbeda, yaitu sesuai dengan tahapan capaian dari peserta didik.

5) Penilaian

Pada Kurikulum 2013 dibagi terkait penilaian pada aspek keterampilan, sikap dan pengetahuan. Sementara di Kurikulum Merdeka ada pemisahan terkait penilaian keterampilan, sikap dan pengetahuan.

6) .Perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah

Dalam perangkat ajar Kurikulum13 biasanya menggunakan buku teks, buku cetak yang diberikan sekolah sebagai bahan pembelajaran. Sementara Kurikulum Merdeka belajar, sumber belajar bisa menggunakan banyak sumber baik teks ataupun non tek yang didapatkan selama pembelajaran.

3. Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam.

Pengertian Islam dari segi bahasa menurut Abuddin Nata mengandung arti patuh, tunduk, taat dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan berahlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama islam dari sumber utamanya kitab suci AlQur'an dan Al-Hadist, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman(Abdu Majid:2017 :11).

Sedangkan pembelajaran PAI adalah suatu proses yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam belajar agama

Islam. Pembelajaran ini akan lebih membantu dalam memaksimalkan kecerdasan peserta didik yang dimiliki, menikmati kehidupan, serta kemampuan untuk berinteraksi secara fisik dan sosial terhadap lingkungan. Pendidikan Islam merupakan suatu proses yang berlangsung secara continue dan berkesinambungan. Berdasarkan hal ini, maka tugas dan fungsi Pendidikan Islam yang perlu diemban adalah pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat. (Mukhtar:14)

Mata pelajaran pendidikan agama Islam pada umumnya tercakup dalam kerangka Al-Qur'an dan hadis, iman, akhlak, fikih/ibadah dan sejarah, sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam mencakup perwujudan kerukunan dan keseimbangan dalam hubungan seseorang dengan Allah SWT, diri sendiri, masyarakat, makhluk lain dan lingkungan.

Selain itu Pendidikan Agama Islam menurut Zakiyah Daradjat, bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha terhadap anak didik agar kelak dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan melalui ajaran-ajaran agama Islam melalui bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. (Mardan Umar, . dan Feiby Ismail 2020:18)

Menurut Durkheim, agama adalah sistem kepercayaan dan politik yang telah dipersatukan yang berkaitan dengan hal-hal yang kudus. Bagi Spencer, agama adalah kepercayaan terhadap sesuatu

yang maha mutlak. Sementara Dewey mengatakan bahwa agama adalah pencarian manusia terhadap cita-cita umum dan abadi meskipun dihadapkan pada tantangan yang dapat mengancam jiwanya; agama adalah pengenalan manusia terhadap kekuatan ghaib yang hebat.

Pendidikan Islam (*Al Tarbiyah Al Islamiyah*) adalah usaha untuk menyiapkan manusia agar hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaan, manis tutur katanya baik lisan maupun tulisan. (Muhammad Athuyah, 2013:11)

Adapun pembelajaran PAI pada program Merdeka Belajar terdapat beberapa perihal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- 1) Satuan pendidikan berkewajiban dalam menyediakan guru agama yang sama dengan keyakinan siswanya. Seorang guru agama memiliki otoritas dalam memperkuat keberagaman siswanya.
- 2) Lembaga pendidikan mempersiapkan sumber daya siswa yang bisa berperan dalam penguasaan wawasan terkait ajaran agama.
- 3) Lembaga pendidikan berkewajiban untuk dapat mempersiapkan guru agama yang dapat menerjemahkan ke dalam kurikulum yang ada.
- 4) Pemerintah dalam kerja samanya dengan satuan pendidikan merancang kurikulum yang dapat memaksimalkan tujuan pembelajaran serta senantiasa menumbuhkan kemerdekaan belajar terhadap siswanya.

5) Guru Agama dituntut untuk dapat multidisipliner sehingga mampu dalam menggabungkan dengan disiplin keilmuan lainnya serta bisa beradaptasi dengan kenyataan secara kompleks.

Pembelajaran PAI hakikatnya ialah aktivitas pembelajaran yang bermakna dan bernilai. Bermakna dalam artian menciptakan siswa yang berakhlak berdasarkan landasan agama. (Asfiati, 2020:4)

b. Fungsi Pendidikan Agama Islam

Bila dilihat secara operasional, fungsi pendidikan Islam dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu :

- 1) Alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan nasional.
- 2) Alat untuk mengadakan perubahan, inovasi dan perkembangan. Pada garis besarnya, upaya ini dilakukan melalui potensi ilmu pengetahuan dan skill yang dimiliki, serta melatih tenaga manusia (peserta didik) yang produktif dalam menemukan perimbangan perubahan sosial-ekonomi yang demikian dinamis. (Asiva Noor Rachmayani. 2023)

c. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam di sekolah bertujuan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan siswa tentang agama Islam sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Tujuan yang diharapkan dalam mengembangkan PAI adalah

- 1) Menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
- 2) Menanamkan nilai-nilai budaya pada umumnya,
- 3) mengembangkan kepribadian, mengembangkan kepekaan rasa, mengembangkan bakat, mengembangkan minat belajar,
- 4) meningkatkan budi pekerti yang luhur sesuai dengan agama dan keyakinannya. (Anwar Syaiful, 2024:1)
- 5) Dengan melakukan bimbingan kepada peserta didik agar mantap secara spiritual, berakhlak mulia, kasih sayang serta sikap toleran sebagai landasan dalam kehidupan
- 6) Membentuk peserta didik yang dapat memahami prinsip agama Islam seperti akhlak mulia, akidah (aqidah sahihah) berdasarkan ahlus sunnah wal jama'ah, syariat, sejarah peradaban Islam dan menerapkan hubungan yang baik dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan alam dalam wadah Negara Republik Indonesia
- 7) Membimbing peserta didik agar dapat menerapkan prinsip Islam dan berpikir sehingga tepat, benar serta arif dalam mengambil keputusan
- 8) Membangun kemampuan nalar kritis dalam menganalisa perbedaan pendapat pada peserta didik sehingga berperilaku moderat serta terhindar dari radikalisme dan liberalis.
- 9) Membentuk peserta didik dalam menyayangi lingkungan alam sekitar serta membangun rasa tanggung jawabnya sebagai khalifa Allah di muka bumi ini.

10) Membangun rasa menjunjung tinggi dalam nilai persatuan pada peserta didik sehingga dapat menguatkan persaudaraan sesama manusia, persaudaraan seagama serta persaudaraan sebangsa dan senegara (Abdul Ghafur,2012:20).

Menurut Abdurrahman Saleh Abdullah mengatakan dalam bukunya "*Educational Theory a Qur'anic Outlook*", bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian sebagai kholifah Allah swt. Atau sekurang-kurangnya mempersiapkan ke jalan yang mengacu kepada tujuan akhir.(Achmad Patoni, 2022:142)

d. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pendidikan agama Islam Pendidikan Islam merupakan sekumpulan ide-ide dan konsep intelektual yang tersusun dan diperkuat melalui pengetahuan dan memiliki ciri yang berorientasi makro, berskala universal, dan bersifat deduktif normatif.Maka dari itu ruang lingkup pendidikan Islam sangat luas, tidak hanya dalam hal landasan pendidikan Islam, tetapi juga dalam hal kegiatan. (Moh.Haitami:2012:16)

Menurut Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, ruang lingkup pendidikan agama Islam adalah pengertian, sumber, dan dasar pendidikan Islam, perpekstif Islam tentang ilmu, perspektif Islam tentang tujuan pendidikan, perpekstif Islam tentang pendidik dan peserta didik, perpekstif Islam tentang sarana dan prasarana pendidikan, perpekstif Islam tentang kurikulum pendidikan, perpekstif Islam tentang strategi, pendekatan, dan metode pendidikan, perpekstif Islam tentang evaluasi pendidikan, dan tentang lingkungan pendidikan.(Haitami dan Kurniawan:2020:17)

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Kajian terhadap penelitian bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka pada bagian ini peneliti perlu mencantumkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, sebagai berikut:

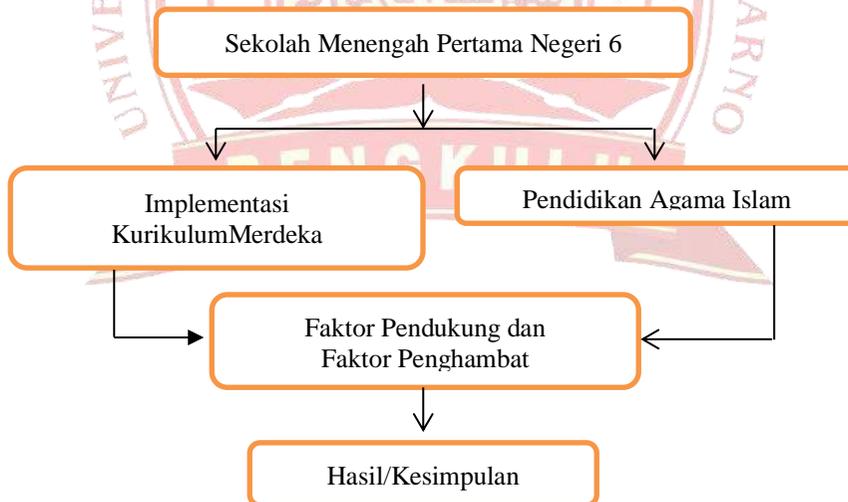
1. Penelitian Inue Sumarsih, Teni Marliyani, Yadi Hadiyansah dkk(2022:5) yang berjudul” Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar” Perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu fenomenologi. Penelitian ini berfokus pada peran kepala sekolah untuk mensukseskan implementasi kurikulum merdeka disekolah penggerak sedangkan yang ingin penulis teliti ialah penerapan kurikulum merdeka belajar pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam. Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif.
2. Penelitian Roos M. S. Tuerah, Jeanne M. Tuerah dkk(2023:10) Universitas Negeri Manado yang berjudul” Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Kajian Teori: Analisis Kebijakan untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Sekolah. Perbedaan ini terletak pada metode yang digunakan ialah kajian teori, sedangkan yang penulis gunakan ialah metode Kualitatif Persaman penelitian ini sama-sama membahas keterlibatan pemangku kepentingan pendidikan.
3. Penelitian Neliwati, Hikmah Bayani Situmorang Putri Maymuhamna Rahayu, dkk (2023:15).Universias Islam Sumatra Utara. Yang berjudul” Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah”Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah. Perbedaan penelitian ini terletak pada permasalahan yang ada seperti fenomena sosial, budaya bahkan tingkah laku manusia, sedangkan yang ingin penulis teliti ialah penerapan

kurikulum merdeka belajar, faktor pendukung dan penghambat implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Negeri Persamaan sama-sama menggunakan metode kualitatif.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan struktur yang terdiri dari berbagai teori yang saling terkait, digunakan sebagai fondasi untuk membangun kerangka konsep

Kerangka Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran (learning loss) yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak anak –anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Keadaan ini kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemic Covid-19.



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir